

**Judul** : HET MinyakKita bakal naik, Komisi VI minta awasi distribusi  
**Tanggal** : Senin, 08 Juni 2026  
**Surat Kabar** : Rakyat Merdeka  
**Halaman** : 3

## HET MinyakKita Bakal Naik

# Komisi VI Minta Awasi Distribusi

**Senayan meminta rencana kenaikan Harga Eceran Tertinggi (HET) MinyakKita diikuti dengan pengawasan ketat. Hal itu agar tidak ada oknum menimbun barang atau memainkan distribusi demi meraup keuntungan berlebihan.**

ANGGOTA Komisi VI DPR Nasim Khan mengaku mendapat informasi Pemerintah akan menaikkan HET MinyakKita dalam waktu dekat. Keputusan tersebut dipengaruhi oleh harga minyak sawit mentah (CPO) yang terus meningkat dan pelemahan nilai tukar rupiah.

Jika keputusan menaikkan HET diambil, Pemerintah wajib melakukan pengawasan distribusi ketat. "Jangan sampai ada pihak yang memanfaatkan kebijakan tersebut untuk kepentingan pribadi dengan menimbun barang atau menaikkan harga secara tidak wajar," kata Nasim di Jakarta, Minggu (7/6/2026).

Sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan, penyesuaian HET MinyakKita didorong oleh beberapa faktor krusial. Terutama, kenaikan harga *Crude Palm Oil* (CPO) serta pembengkakan biaya produksi dan distribusi. Tekanan ini dirasakan langsung oleh para produsen dan pelaku usaha, sehingga penyesuaian

HET dinilai perlu dilakukan untuk menjaga keberlangsungan pasokan.

"Memang harga CPO naik, kemarin rata-rata di angka Rp 15.445, tapi sempat turun ke Rp 14.000-an dan sekarang harga Tandan Buah Segar (TBS) mulai naik lagi," ujar Budi di Jakarta, Jumat (5/6/2026).

Nasim melanjutkan, MinyakKita merupakan program minyak goreng rakyat yang ditujukan untuk menjaga daya beli masyarakat, khususnya kelompok menengah ke bawah. Karena itu, kenaikan harga tidak boleh membebani masyarakat akibat lemahnya pengawasan di lapangan.

"Kalau HET naik tetapi distribusinya tidak diawasi dengan baik, harga di tingkat konsumen bisa melonjak jauh lebih tinggi dari yang ditetapkan Pemerintah," kata Nasim mengingatkan.

Yang dirugikan, lanjutnya, tentu masyarakat kecil yang selama ini mengandalkan MinyakKita sebagai minyak goreng dengan harga terjangkau. Karena itu, aparat pe-

negak hukum, Satgas Pangan, Kementerian Perdagangan (Kemendag), dan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk aktif mengawasi rantai distribusi MinyakKita hingga ke tingkat pengecer.

"Praktik penimbunan dan permainan distribusi harus ditindak tegas karena berpotensi menciptakan kelangkaan, semu dan memunculkan lonjakan harga di pasar," tegas politikus PKB ini.

Untuk itu, ia meminta Pemerintah tidak hanya mengawasi, tetapi juga memberikan sanksi tegas kepada siapa pun yang terbukti menimbun MinyakKita atau memainkan distribusi untuk menjualnya dengan harga lebih tinggi. "Jangan sampai ada pihak yang mengambil keuntungan di tengah kesulitan masyarakat," tegasnya.

Menurutnya, penegakan hukum yang tegas akan memberikan efek jera sekaligus memastikan kebijakan Pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Apalagi, MinyakKita merupakan kebutuhan pokok yang menyangkut hajat hidup orang banyak sehingga tidak boleh dijadikan objek spekulasi oleh segelintir pihak.

Nasim menyampaikan saat ini HET MinyakKita berada pada angka Rp 15.700 per liter. Namun,

di sejumlah daerah harga jual di pasar masih ditemukan jauh di atas HET, bahkan mencapai Rp 20 ribu hingga Rp 22 ribu per liter. Kondisi tersebut menunjukkan masih adanya persoalan dalam rantai distribusi yang harus segera dibenahi Pemerintah.

Dengan itu, ia menegaskan jangan sampai kenaikan HET justru menjadi alasan bagi oknum tertentu untuk semakin menaikkan harga di pasar. "Yang harus dijaga adalah ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan keterjangkauan harga bagi masyarakat," imbuh politikus asal Jawa Timur (Jatim) ini.

Anggota Komisi VI DPR Askweni menambahkan, setiap kebijakan penyesuaian harga harus benar-benar mempertimbangkan daya beli masyarakat. Jangan malah semakin membebani rakyat yang saat ini masih menghadapi berbagai tekanan ekonomi.

Menurutnya, MinyakKita sejak awal dirancang sebagai instrumen negara untuk menjaga keterjangkauan harga minyak goreng bagi masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah.

"Karena itu, setiap perubahan harga harus dilakukan secara hati-hati dan transparan," tegas Askweni di Jakarta, Minggu (7/6/

2026).

Pemerintah, lanjutnya, perlu memastikan rencana kenaikan HET MinyakKita benar-benar didasarkan pada perhitungan yang objektif dan terukur. Jangan sampai kebijakan ini justru menambah beban masyarakat yang selama ini mengandalkan MinyakKita sebagai pilihan minyak goreng yang terjangkau.

Ia memahami adanya faktor keekonomian yaitu dinamika harga bahan baku, termasuk kenaikan harga *crude palm oil* (CPO) dan faktor biaya produksi yang menjadi pertimbangan Pemerintah. Namun, negara harus tetap menempatkan perlindungan terhadap konsumen sebagai prioritas utama. Juga memastikan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat dijangkau. "Jangan seluruh beban kenaikan biaya produksi akhirnya dialihkan kepada konsumen," imbuh politikus PKS ini.

Selain itu, ia meminta Pemerintah membuka secara transparan dasar perhitungan yang digunakan dalam menentukan HET baru MinyakKita. Transparansi tersebut penting untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus agar masyarakat memahami alasan di balik kebijakan yang diambil memang benar-benar diperlukan. ■